

**STRATEGI POLITIK DPD  
PARTAI DEMOKRAT NTT DALAM KONTESTASI PEMILU  
2024 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
(Studi Kasus Di Dapil NTT 1 Kota Kupang)**

**Aprilianus Ndarinu, Mikhael Thomas Susu, Urbanus Ola Hurek**  
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Katolik Widya Mandira  
Kupang Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Email : Portugalcr684@Gmail.Com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul Strategi Politik DPD Partai Demokrat NTT dalam Kontestasi Pemilu 2024 Provinsi NTT Studi Kasus Di Dapil NTT 1. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Strategi Politik DPD Partai Demokrat NTT dalam Kontestasi Pemilu 2024 Provinsi NTT Studi Kasus Di Dapil NTT 1. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan masalah penelitian adalah strategi politik menurut Peter Schroder terutama strategi politik ofensif dan defensif. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Strategi politik ofensif DPD Partai Demokrat NTT mengutamakan strategi kampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dan pemasangan alat peraga untuk membangun kepercayaan pemilih, dengan fokus pada kelompok muda dan perempuan sebagai pemilih strategis. DPD Demokrat NTT membentuk Tim Satgas Pemenangan yang terdiri dari tokoh penting untuk mengkoordinasi kampanye dan menyesuaikan strategi dengan kebutuhan lokal. Pemetaan wilayah yang mendalam digunakan untuk memahami karakteristik pemilih di setiap kecamatan, sementara peran organisasi sayap, seperti Bintang Muda Indonesia (BMI), diperkuat untuk menarik pemilih muda dan perempuan. Dengan strategi terorganisir, pemetaan wilayah, dan evaluasi melalui survei, Partai Demokrat bertujuan memperluas dukungan dan meningkatkan peluang kemenangan di Dapil 1 NTT pada Pemilu 2024. 2) Strategi politik defensif DPD Partai Demokrat NTT dalam menghadapi Pemilu 2024 di Dapil NTT 1, DPD Partai Demokrat menerapkan strategi segmentasi pemilih yang mencakup demografi, perilaku rasional-emosional, dan kohor, dengan menyesuaikan program untuk pemilih muda yang fokus pada pendidikan dan inovasi, serta pemilih tua yang mengutamakan kesejahteraan sosial. Pendekatan rasional dan emosional digunakan melalui bukti keberhasilan dan interaksi langsung di kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, Satgas Pemenangan Pemilu mengusung 14 program unggulan dalam lima klaster utama, termasuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, infrastruktur, dan*

*penegakan hukum, dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat, guna memperkuat dukungan dan peluang kemenangan di Pemilu 2024. Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa strategi politik yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat dalam menghadapi pemilu berupa penerapan strategi politik ofensif dan defensif*

**Kata Kunci :** *Strategi Politik, DPD Partai Demokrat, NTT*

#### **ABSTRACT**

*This research is titled *The Political Strategy of the NTT Provincial Chapter of the Democratic Party in the 2024 Legislative Election Contest in NTT: A Case Study in Electoral District 1 NTT*. The research question of this thesis is: What is the political strategy of the NTT Provincial Chapter of the Democratic Party in the 2024 legislative election contest in NTT, specifically in Electoral District 1? The theory used by the researcher to address the research problem is political strategy according to Peter Schroder, particularly focusing on offensive and defensive political strategies. The primary data source consists of informants, while secondary data includes documents related to the research variables. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, drawing conclusions, and descriptive qualitative analysis. The research findings show that: (1) The offensive political strategy of the NTT Provincial Chapter of the Democratic Party prioritizes campaign strategies through limited meetings, face-to-face interactions, and the use of campaign materials to build voter trust, with a focus on young people and women as strategic voters. The NTT Democratic Party has formed a Winning Task Force consisting of key figures to coordinate the campaign and tailor strategies to local needs. In-depth voter mapping is used to understand the characteristics of voters in each sub-district, while the role of wing organizations, such as Bintang Muda Indonesia (BMI), is strengthened to attract young and female voters. With an organized strategy, voter mapping, and evaluation through surveys, the Democratic Party aims to expand support and improve its chances of winning in Electoral District 1 NTT in the 2024 legislative election. (2) The defensive political strategy of the NTT Provincial Chapter of the Democratic Party in facing the 2024 legislative election in Electoral District 1 includes voter segmentation strategies based on demographics, rational-emotional behavior, and cohorts, with tailored programs for young voters focusing on education and innovation, and for older voters prioritizing social welfare. Rational and emotional approaches are used through evidence of success and direct interactions in social activities and economic empowerment. In addition, the Winning Task Force promotes 14 main programs within five key clusters, including education, health, MSME empowerment, infrastructure, and law enforcement, with the goal of improving human resources quality, environmental protection, and people's welfare to strengthen support and increase the chances of victory in the 2024 legislative election. Based on the*

*above analysis, the author concludes that the political strategy implemented by the NTT Provincial Chapter of the Democratic Party in facing the election involves the application of both offensive and defensive political strategies.*

**Keywords:** *Political Strategy, DPD Democratic Party, NTT*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu Negara yang berdasarkan hukum, menjamin hak warga negaranya dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”(Mohamad iqbal, 2016, p. 1).

Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia atau dalam hukum tata negara sebagai sistem kenegaraan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi warga Negara Indonesia untuk bisa mendirikan suatu organisasi, termasuk mendirikan atau bergabung dalam suatu partai politik (Mohamad iqbal, 2016, p. 1).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dari partai politik menurut penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tujuan partai politik dibagi menjadi 2 jenis, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum Partai Politik; a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai yang dimaksud pada pembukaan UUD 1945; b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Memajukan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RI; serta d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus bagi Partai Politik; a. Meningkatkan tingkat keikutsertaan politik anggota dan masyarakat dalam rangka pengurusan kegiatan politik dan pemerintahan; b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara dan; c. Membangun etika serta budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fungsi utama dan pertama partai politik menurut Surbakti (2007, pp. 116–121) adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Adapun cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Partai politik baik dalam sistem politik apapun, apalagi sistem politik demokrasi, ia pasti harus melaksanakan sejumlah fungsi, di antaranya Sosialisasi Politik, Rekrutmen Politik, Partisipasi Politik, Pemadu Kepentingan, Komunikasi Politik, Pengendalian Konflik dan Kontrol Politik.

Fungsi rekrutmen politik yang tertuang di dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan salah satu fungsi partai politik yaitu sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Maka dapat diketahui bahwa rekrutmen politik sangat penting dilakukan dengan tujuan merekrut orang-orang untuk bergabung menjadi anggota

partai dan aktif dalam aktivitas partai, serta menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pejabat publik (Pradana, 2021, p. 3).

Tahap Kandidasi menjadi tonggak awal yang penting bagi setiap parpol. Dalam hal kandidasi di sebuah partai politik terdapat satu konsep yang telah menjadi konsep dasar dari model kandidasi yang demokratis, yang disebut konsep demokrasi intra partai. Praktik yang ideal adalah partai politik dapat mengimplementasikan demokrasi di internalnya sendiri. Demokrasi intra partai menggambarkan pola relasi kuasa yang setara diantara yang ada dalam suatu partai politik. Demokrasi intra partai menurut Croissant dan Chambers dapat dikatakan sebagai sebuah karakter distribusi atas kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan antara anggota dan pemimpin di dalam sebuah politik yang didasarkan pada prinsip inklusivitas dan desentralisasi (Allahi & Rahman, 2020, p. 48).

Kandidasi adalah komponen sentral dari proses politik. Pengorganisasian partai politik bermuara pada lahirnya para kandidat yang akan mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian, para kandidat adalah garda terdepan bagi parpol dalam rangka implementasi atas ideologi dan platform. Dalam konteks pemilu, kandidasi adalah input dari proses pemilu yang panjang. Proses pemilu yang demokratis dan berintegritas tidak

akan mampu melahirkan representasi politik yang sesuai dengan kehendak rakyat jika bahan mentah dari pemilu itu sendiri sudah jelek (Tampinongkol et al., 2019, p. 3).

Membahas kandidasi (penetapan kandidat) akan mengurai banyak hal tentang partai politik, diantaranya kandidasi menunjukkan dimana lokus kekuasaan di partai politik itu berada sesungguhnya, kandidasi menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi, kandidasi akan menunjukkan politik representasi yang dihadirkan partai politik, kandidasi memperlihatkan perjuangan kekuasaan di internal partai, kandidasi menjadi penentu bagaimana wajah partai di ruang publik dan kandidasi memperlihatkan tipe kepartaian.

Partai Demokrat (PD) didirikan atas dasar keinginan Susilo Bambang Yudhoyono, dikarenakan oleh kekalahan SBY pada bursa seleksi calon wakil presiden dalam proses gejala Sidang Istimewa MPR 2001 (Hisyam, 2004, p. 45). Susilo Bambang Yudhoyono berinisiatif membentuk partai dan mendapat dukungan dari para pengusaha. Vence Rumangkang merupakan salah satu tokoh pengusaha yang memprakarsai dan mendirikan Partai Demokrat hingga resmi terdaftar. Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian lebih dikenal dengan nama singkatannya, SBY, telah lebih dahulu dikenal masyarakat dibandingkan dengan nama Partai Demokrat. Dengan demikian, popularitas SBY lebih dulu

naik daripada Partai Demokrat (Mentari, 2018, p. 4).

Sosok SBY menjadi pendulang suara bagi Partai Demokrat pada pemilu 2004 dan pemilu 2009. Namun pada pemilu 2014 suara partai merosot. Salah satu faktor penurunan elektabilitas partai Demokrat tidak lain karena sepanjang tahun 2009 sampai tahun 2014 banyak tokoh partai Demokrat terjerat kasus korupsi, terutama kasus Anas Urbaningrum yang saat itu tengah menjabat Ketua Umum Partai Demokrat. Saat itu, SBY menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan. Serta Ketua Majelis Tinggi Partai secara ex-officio (Mentari, 2018, p. 4).

Majelis Tinggi Partai merupakan posisi puncak dalam struktur organisasi Partai Demokrat di AD/ART tahun 2010-2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosok SBY tetap berpengaruh di partai dan berada pada posisi sentral, sekalipun bukan ketua umum. Hanya saja, di mata pendukungnya, hal tersebut tidak berpengaruh banyak, dan menyebabkan perolehan suara yang menurun drastic pada pemilu 2014. Penurunan suara partai Demokrat menjadi bukti bahwa citra partai sangat memengaruhi elektabilitasnya. Partai Demokrat yang mengandalkan popularitas dan nama besar tokoh untuk membangun citranya menunjukkan bahwa partai memiliki organisasi yang rapuh (Mentari, 2018, p. 5).

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara yang menganut demokrasi. Pemilu dilakukan sebagai suatu sarana untuk mendapatkan pemimpin atau wakil rakyat, yang dipilih langsung oleh rakyat guna untuk mewakili kepentingan rakyat. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat (Suyadi & Azis, 2020, p. 80).

Perolehan suara partai politik dalam sistem pemilu proporsional terbuka sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; (a). Popularitas dan daya tarik personal kandidat sangat berpengaruh terhadap jumlah suara yang diperoleh partai; (b) Efektivitas strategi kampanye partai dalam memobilisasi pemilih, termasuk penggunaan media sosial, iklan, debat, dan kampanye langsung, memainkan peran besar dalam menarik dukungan; (c) Partai politik menyelaraskan diri dengan isu-isu yang penting bagi pemilih dan menawarkan program yang dianggap relevan dan solutif akan mempengaruhi jumlah suara yang mereka dapatkan; dan (e) Dukungan dari tokoh masyarakat atau figur publik yang populer bisa memberikan

keuntungan signifikan bagi partai politik dalam menarik pemilih; serta (f) Upaya partai dalam mendorong partisipasi pemilih dan memastikan basis dukungan mereka datang ke tempat pemungutan suara adalah faktor penting lainnya (Adnan, 2016, p. 38).

Pada pemilu legislatif 2019, perolehan suara Partai Demokrat memperlihatkan tren yang negatif. Partai Demokrat mengalami penurunan jumlah suara yang sangat signifikan dan hanya berhasil menempati peringkat keenam nasional perolehan suara terbanyak dengan perolehan 54, jauh di bawah PDIP (128 Kursi), Golkar (85 Kursi), Gerindra (78 Kursi), Nasdem (59 Kursi) dan PKB (58 Kursi). Menurunnya perolehan kursi dan suara partai Demokrat ini juga terlihat di Dapil I (Kota Kupang) DPRD Provinsi NTT 2019 dimana tidak ada satupun caleg demokrat yang terpilih. Pada pemilu 2019 di Dapil I (Kota Kupang), partai Demokrat hanya menempati urutan ketujuh dengan perolehan suara sebanyak 9.426 suara. Golkar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 38.847 suara. Adapun caleg yang terpilih dari Dapil I (Kota Kupang) yaitu Adoe Yuliana Elisabeth dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yonas Salean dan Mohammad Anzor dari partai Golkar, Christian Mboeik dari Nasdem, Alexander Foenay dari Perindo dan Christian Widodo dari PSI. Tabel perbandingan perolehan kursi Partai Demokrat pada pemilu legislatif



tahun 2004 - 2014 di Dapil I, dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1. 1**  
**Caleg Terpilih dan Jumlah Suara Partai**  
**di Dapil I Provinsi NTT Tahun 2004-2019**

No.	Nama	Partai	Jenis Kelamin	Jumlah Suara
<b>2004-2009</b>				
1.	Marten Kase	Demokrat	L	6.356
<b>Periode 2009-2014</b>				
1	Nelson Matara	PDIP	L	11.062
2	Ibrahim Medah	Golkar	L	60.395
3	Samuel Viktor Nitti	Golkar	L	5.377
4	Petrus Mesakh	Golkar	L	5.761
5	Jimmy Sianto	Hanura	L	3.872
6	Daud Saleh Ludji	PKPB	L	3.462
7	Libret Samuel Foenay	Gerindra	L	8.662
8	Markus Nubatonis	Karya Perjuangan	L	3.553
9	Somie Pandie	Anugrah PDS	L	4.418
10	Marten Kase	Demokrat	L	7.235
<b>Periode 2014-2019</b>				
1	Antonius Bele	PDIP	L	9.084
2	Viktor Lerik	Gerindra	L	13.009
3	Alexander Ena	Nasdem	L	9.635
4	Mohammad Ansor	Golkar	L	8.348
5	Jimmy Willbaldanto	Hanura	L	6.115
6	Kardinad Kale Lena	Demokrat	L	7.365

Sumber Data: diolah dari KPU Provinsi NTT 2019

Dari tabel 1.1, partai Demokrat selama pemilihan legislatif tahun 2004-2014 di Dapil I (Kota Kupang) selalu mengutus kader terbaiknya untuk duduk di DPRD Provinsi NTT. Di tahun 2004 dan 2009, Marten Kase terpilih menjadi anggota DPRD dengan perolehan suara sebesar 6.356 di tahun 2004 dan 7.235 di tahun 2009. Di tahun 2014, Kardinad Kale Lena terpilih menjadi anggota DPRD dengan perolehan suara sebesar 7.365. Di tahun 2019, untuk pertama kalinya tidak ada calon anggota DPRD dari partai Demokrat yang terpilih di Dapil I (Kota Kupang). Data caleg Terpilih dan Jumlah Suara Partai di Dapil I Provinsi

NTT Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1. 2**  
**Caleg Terpilih dan Jumlah Suara Partai Politik**  
**di Dapil I Provinsi NTT Tahun 2019**

No.	Nama	Partai	Jenis Kelamin	Jumlah Suara	Jumlah Suara Partai	Peringkat
1	Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos	PDIP	P	4.149	17.078	4
2	Jonas Salean, SH., M.SI	Golkar	L	26.065	38.847	1
3	IR. Mohammad Ansor	H. Golkar	L	4.913		
4	P. Christian Mboeik	Nasdem	L	13.935	26.722	2
5	Ir. Foenay Alexander	Perindo	L	4.902	13.755	5
6	dr. Widodo	Christian PSI	L	12.722	20.106	3
7	-	PAN	-	-	11.679	6
8	-	Demokrat	-	-	9.426	7
9	-	PKB	-	-	8.831	8
10	-	PPP	-	-	8.552	9
11	-	Gerindra	-	-	6.698	10
12	-	Hanura	-	-	6.240	11
13	-	PKS	-	-	4.362	12
14	-	Berkarya	-	-	4.084	13
15	-	PKPI	-	-	3.764	14
16	-	PBB	-	-	2.941	15
17	-	Garuda	-	-	2.682	16

Sumber Data: diolah dari KPU Provinsi NTT 2019

KPU Provinsi NTT sudah menetapkan jumlah DPT dalam pemilu 2024 sebanyak 4.008.475 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 1.971.831 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 2.036.644. Pemilih yang terbanyak berada di Dapil V (Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka) sebanyak 699.425 pemilih sedangkan paling sedikit berada di Dapil I (Kota Kupang) sebanyak 320.659 pemilih. Data DPT Pemilihan legislatif Provinsi NTT di 8 Daerah Pemilihan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**DPT Pemilihan Legislatif Provinsi**  
**NTT di 8 Daerah Pemilihan Tahun**  
**2024**

No	Dapil	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	I	Kota Kupang	320.659
2	II	Kupang	262.849
		Rote Ndao	100.926
		Sabu Raijua	62.280
3	III	Sumba Timur	186.181
		Sumba Barat	100.628
		Sumba Barat Daya	240.951
		Sumba Tengah	57.654
4	IV	Manggarai	242.090
		Manggarai Barat	196.969
		Manggarai Timur	216.608
5	V	Ngada	124.375
		Nagekeo	119.724
		Ende	211.104
		Sikka	244.222
6	VI	Flores Timur	208.890
		Lembata	104.542
		Alor	155.854
7	VII	Timor Tengah Utara	193.040
		Belu	161.304
		Malaka	148.069
8	VIII	Timor Tengah Selatan	349.656
8 Dapil		Provinsi NTT	4.008.475

Sumber Data: diolah dari KPU Provinsi NTT 2024

Kota Kupang ditetapkan sebagai Dapil I Provinsi NTT dengan 320.659 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 158.834 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 161. 831 pemilih yang tersebar di 1.335 TPS yang ada di 51 kelurahan atau 6 kecamatan. Pemilih terbanyak berada di Kecamatan Oebobo, dengan jumlah pemilih 74.003, diikuti Kecamatan Maulafa 71.674 pemilih, Kecamatan Alak 54.081 pemilih, Kecamatan Kelapa Lima 53.767 pemilih, Kecamatan Kota Raja 41.020 pemilih, dan Kecamatan Kota Lama dengan jumlah pemilih paling sedikit , yaitu 25.400 pemilih (KPU Kota Kupang, 2023).

Dalam menyikapi kegagalan Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2019 di Dapil I Provinsi NTT (Kota Kupang) dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu legislatif 2024, DPD Demokrat NTT sudah menetapkan 6 calon terbaiknya yaitu Paskalis Angkur, Frans Adrianus, Maria Goa, Alfred Baitanu, Elsi Tomboi dan Daniel Hake. Dengan melihat 6 komposisi caleg yang akan bertarung, penulis ingin meneliti sejauh mana strategi politik yang digunakan DPD Demokrat NTT dalam memenangkan kontestasi pemilu legislatif 2024 di Dapil I Provinsi NTT (Kota Kupang).

### KAJIAN PUSTAKA

#### Partai Politik

Pada umumnya perkembangan partai politik sejalan dengan perkembangan demokrasi, yakni dalam hal perluasan hak pilih dari rakyat dan perluasan hak-hak parlemen (Amal, 2012, p. 28).

Menurut Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan



yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas (Budiardjo, 2005, p. 162).

Di antara banyak fungsi demokratisasi oleh parpol, menurut Thomas Mayer (2012, p. 33) ada lima yang sangat penting:

1. Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat.
2. Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka.
3. Mengatur proses pembentukan kehendak politis (*political will*) dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur.
4. Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen.
5. Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antar pemilu.

## Pemilu

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Bachmid, 2021, p. 88).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah (Nazir, 2017, p. 83).

Menurut Surbakti & Fitrianto (2015, p. 7) pemilu memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a) Sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara Negara.
- b) Pemilu memiliki fungsi sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu (calon anggota legislatif maupun calon pejabat eksekutif).
- c) Pemilu sebagai mekanisme yang mampu menjamin adanya perubahan politik (sirkulasi elit dan perubahan pola dan arah kebijakan publik) secara periodik.
- d) Pemilu sebagai sarana penyelesaian konflik dengan cara memindahkan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan yang ada di masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dimusyawarahkan, diperdebatkan, dan diselesaikan secara terbuka dan beradab.

Tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak kegiatan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya karena hari pemungutan suara (*polling day*) berada pada tahapan ini dan karena itu pada hari itulah rakyat yang berhak memilih menyatakan kedaulatannya melalui pemberian suara, tetapi juga karena pada tahapan inilah seluruh asas pemilu yang demokratis diterapkan. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa

“pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Dengan demikian asas-asas pemilu yang demokratis menurut UUD 1945 adalah “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” (luber jurdil) (Ramlan Surbakti, 2011, p. 7).

Asas-asas penyelenggara pemilu merujuk pada seperangkat sistem nilai yang dikehendaki undang-undang untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Mengingat tugas utama mereka berkaitan dengan mekanisme mengubah suara menjadi kursi penyelenggara negara yang kredibel melalui pemilu, maka penyelenggara pemilu harus dijabat oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas (Ramlan Surbakti & Kris Nugroho, 2015, p. 17).

### **Strategi Partai Politik**

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu “*stratos*” yang artinya tentara dan kata “*agein*” yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata *strategos* yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jenderal (*The art of general*). Dalam strategi terdapat prinsip yang harus dicamkan, yakni tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan

oleh musuh, sebelum mereka mengerjakannya (Rahmi, et,al 2016, p. 18).

Strategi politik adalah segala rencana dan tindakan untuk memperoleh kemenangan dan meraih kursi dalam pemilu. Menurut Schroder. Strategi Politik saat ini telah digunakan untuk memenangkan kandidat tertentu dalam berbagai pesta demokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah, mulai dari pemilu legislatif, pemilihan presiden, kepala daerah bahkan yang terkecil adalah pemilihan kepala desa. Strategi politik menciptakan berbagai kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan/potensi suara yang dapat diraih dan metode pendekatan yang diperlukan terhadap pemilih (Suaib Napir, 2016, p. 150).

Untuk dapat menetapkan pilihan yang tepat, partai politik dan politisi harus memiliki kemampuan untuk mengenali pola dasar strategi yang diperlukan. Setelah pola dasar strategi dibangun, ada satu pilihan dari sederetan strategi tunggal, di mana pilihan ini dipengaruhi oleh syarat-syarat kerangka kerja, *target image* serta sasaran-sasaran organisasi. Strategi politik menurut Schroder (2010, p. 185) di bagi menjadi dua, yaitu: strategi ofensif dan strategi defensif.

Strategi ofensif adalah strategi memperluas pasar dan strategi menembus pasar. Dalam memperluas pasar, partai politik menggunakan strategi ini untuk menambah jumlah

massa pendukung melalui kampanye pemilu dan implementasi politik. Dalam hal ini ditekankan bahwa partai politik melakukan kampanye pada pemilu mempunyai tujuan untuk menambah jumlah pemilih baru dan mempertahankan jumlah pemilih lama. Sementara strategi menembus pasar, partai politik dilakukan untuk mengoptimalkan penggalian potensi yang sudah ada sehingga akan dicapai hasil yang lebih baik. Penggalian potensi yang sudah ada dimaksudkan pada sumber daya manusia yang sudah memadai namun belum banyak potensi yang dimunculkan ke permukaan (Schroder, 2010, p. 185).

Strategi defensif adalah strategi mempertahankan pasar dan strategi menyerahkan pasar. Dalam strategi mempertahankan pasar partai politik mengambil jalan untuk mempertahankan pemilih tetapnya guna mempertahankan perolehan suara dalam pemilu. Partai politik yang menggunakan strategi ini lebih cenderung untuk menutupi perbedaan yang ada dimasing-masing partai, sehingga perbedaan tersebut tidak dapat dikenali oleh partai politik lain. Karena seyogyanya hal ini dilakukan untuk menjalankan pemeliharaan yang lebih intens untuk mempertahankan pendukung massa. Sedangkan strategi menyerahkan pasar dapat memiliki dua arti, yang dicontohkan oleh dua kasus ini: dalam kasus yang pertama, sebuah partai ingin menyerah dan dalam keadaan tertentu ingin melebur dengan

partai lain. Yang kedua, dalam pemilu yang menggunakan ballot (ballotage), dimana ada tahap pemungutan suara kedua. Pilihan kedua sering digunakan oleh partai politik, mereka harus mampu merencanakan strategi baru dalam pemungutan suara tahap kedua (Schroder, 2010, p. 188).

## METODE

Menurut (Arikunto Suharsimi, 1992, p. 27) penentuan suatu metode penelitian, sangat tergantung dari tujuan dan pendekatan yang diinginkan. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Namawi, 1987, p. 62)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Politik DPD Partai Demokrat NTT dalam Kontestasi Pemilu 2024 Provinsi NTT Studi Kasus Di Dapil NTT 1, yang dianalisis menggunakan 2 aspek, yakni strategi politik *ofensif* dan strategi politik *defensive*.

### Strategi Politik *Offensif*

Untuk menggambarkan strategi politik *ofensif* berupa kampanye politik

dan pembentukan panitia pemenangan pemilu serta Strategi menembus konstituen berupa pemetaan wilayah dan kelompok pemilih serta pengoptimalan organisasi sayap partai.

### Strategi Memperluas Basis Pemilih

Pada Pemilu 2024 di Dapil NTT 1, Partai Demokrat mengimplementasikan strategi kampanye yang menekankan pada pertemuan terbatas dan tatap muka, dengan pemasangan alat peraga seperti baliho, stiker, dan kartu nama. Pendekatan ini sengaja diambil untuk menghindari kampanye terbuka dengan kerumunan massa, yang bisa memerlukan anggaran besar. Dengan strategi ini, Partai Demokrat lebih fokus pada komunikasi yang lebih personal dan efektif, yang diharapkan dapat membangun kedekatan emosional antara caleg dan pemilih. Hal ini juga memungkinkan caleg untuk lebih mendalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan visi misi mereka secara langsung.

Tim Satuan Tugas Pemenangan yang dibentuk oleh DPD Demokrat NTT berperan penting dalam mengoordinasi berbagai aktivitas kampanye di Dapil I NTT. Tim ini terdiri dari tokoh-tokoh penting yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kampanye berjalan sesuai dengan rencana dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, khususnya yang berkaitan dengan kelompok muda dan perempuan, yang dianggap sebagai pemilih strategis. Selain itu, tim ini

juga memiliki peran dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengimplementasikan feedback untuk menyempurnakan strategi kampanye, dengan fokus pada isu-isu yang relevan di Dapil NTT 1.

Untuk memperkuat struktur internal partai, Partai Demokrat juga melakukan konsolidasi melalui Rakerda dan pembentukan Satgas Pemilu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua elemen partai, dari tingkat provinsi hingga kecamatan, bekerja dengan sinergi dan mendukung upaya kemenangan. Penggunaan media sosial menjadi salah satu kunci dalam kampanye, dengan tujuan membangun citra caleg yang lebih modern dan menjangkau pemilih yang lebih luas, terutama di kalangan pemilih muda. Dengan strategi yang terorganisir, dukungan relawan, dan penggunaan atribut visual, Partai Demokrat berharap dapat meraih dukungan maksimal di Dapil NTT 1 dan meningkatkan peluang kemenangan di Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Demokrat mengutamakan strategi kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, dan pemasangan alat peraga, yang memungkinkan komunikasi personal untuk membangun kepercayaan pemilih. DPD Demokrat NTT membentuk Tim Satgas Pemenangan berisi tokoh penting guna mengoordinasi kampanye, menyerap aspirasi, dan menyesuaikan strategi

dengan kebutuhan lokal, terutama bagi kelompok muda dan perempuan sebagai pemilih strategis. Konsolidasi melalui Rakerda dan pembentukan Satgas memperkuat struktur partai, sementara media sosial dimanfaatkan untuk membangun citra modern dan memperkenalkan caleg. Dengan strategi terorganisir, dukungan relawan, dan atribut visual, Demokrat berupaya memaksimalkan dukungan di Dapil 1 NTT untuk meraih kemenangan di Pemilu 2024.

### **Strategi Penembus Konstituen**

Partai Demokrat di Dapil NTT 1 mengimplementasikan strategi pemetaan wilayah yang mendalam dengan tujuan memahami karakteristik pemilih di setiap kecamatan dan kelurahan berdasarkan faktor demografi, ekonomi, dan budaya. Pemetaan ini sangat penting untuk merancang kampanye yang lebih terfokus dan relevan, mengingat keberagaman masyarakat di Kota Kupang. Dengan memahami karakteristik tiap wilayah, partai dapat lebih efektif menyampaikan pesan kampanye yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing kelompok pemilih, serta memperkuat hubungan antara partai dan masyarakat lokal.

Selain pemetaan wilayah, pengoptimalan peran organisasi sayap partai, khususnya Bintang Muda Indonesia (BMI), juga menjadi bagian penting dari strategi kampanye Partai Demokrat. BMI berfokus pada pemilih

muda dan perempuan, dua kelompok yang dianggap sangat strategis dalam Pemilu 2024. Dengan melibatkan kader-kader muda yang memiliki militansi dan jaringan luas, BMI berperan dalam memperkenalkan visi misi Partai Demokrat kepada pemilih muda, sekaligus memperluas jangkauan kampanye di kalangan pemilih perempuan. Kombinasi penguatan BMI dan pemetaan wilayah yang mendalam diharapkan dapat memperluas basis dukungan dan meningkatkan peluang kemenangan di Dapil I.

Pendekatan berbasis survei juga diterapkan untuk mengevaluasi elektabilitas masing-masing caleg dan menyesuaikan strategi kampanye. Survei ini memberikan data yang berharga terkait dengan tingkat keterpilihan caleg di tiap kecamatan dan kelurahan, serta preferensi pemilih yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Dengan memanfaatkan data survei, Partai Demokrat dapat mengidentifikasi potensi dukungan dan merumuskan langkah-langkah kampanye yang lebih efektif. Dengan pendekatan yang terencana, berbasis data, dan melibatkan seluruh elemen partai, Partai Demokrat berupaya meraih kemenangan pada Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Demokrat menerapkan strategi pemetaan wilayah yang mendalam untuk memahami karakteristik pemilih berdasarkan demografi, ekonomi, dan budaya di setiap kecamatan dan kelurahan,

sehingga kampanye menjadi lebih terfokus dan relevan. Pengoptimalan peran organisasi sayap partai, terutama (BMI), menjadi fokus utama untuk menarik pemilih muda dan perempuan sebagai target strategis. Dengan mengkombinasikan pemetaan wilayah dan penguatan BMI, serta menggunakan survei untuk mengevaluasi elektabilitas caleg, Partai Demokrat berharap dapat memperluas dukungan dan meningkatkan peluang kemenangan pada Pemilu 2024 di Dapil I.

#### **Strategi Politik *Defensive***

Untuk menggambarkan strategi politik *defensive* DPD Partai Demokrat NTT dalam Kontestasi Pemilu 2024 Provinsi NTT Studi Kasus Di Dapil NTT 1 berupa indikator Segmentasi pemilih dan janji kampanye.

#### **Segmentasi Pemilih**

Dalam menghadapi Pemilu 2024 di Dapil NTT 1, DPD Partai Demokrat mengimplementasikan strategi segmentasi pemilih yang terintegrasi, melibatkan pendekatan berbasis demografi, perilaku rasional-emosional, dan pendekatan kohor. Strategi ini dirancang untuk memahami kebutuhan unik dari berbagai kelompok pemilih, seperti pemilih muda yang mengutamakan isu pendidikan, inovasi digital, dan lapangan kerja, serta pemilih yang lebih tua yang fokus pada program kesejahteraan sosial dan perlindungan ekonomi. Dengan memahami karakteristik ini, Demokrat



dapat merancang program kampanye yang lebih relevan dan berdampak.

Pendekatan berbasis perilaku mencakup aspek rasional dan emosional, di mana program konkret, seperti peningkatan infrastruktur pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal, ditonjolkan untuk menarik pemilih rasional. Sementara itu, pendekatan emosional diwujudkan melalui kehadiran langsung para caleg dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Interaksi langsung ini bertujuan membangun kedekatan emosional antara partai, caleg, dan konstituen, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap visi-misi Partai Demokrat.

Partai Demokrat juga memanfaatkan pendekatan kohor dengan memastikan kehadiran aktif para caleg dalam kegiatan yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, seperti perayaan keagamaan, bakti sosial, dan pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi UMKM. Dengan strategi ini, Demokrat tidak hanya membangun basis dukungan yang solid tetapi juga menunjukkan komitmen nyata terhadap kebutuhan masyarakat. Gabungan pendekatan yang strategis dan berbasis data ini diharapkan mampu meningkatkan peluang kemenangan Demokrat di Dapil NTT 1 pada Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi Pemilu 2024 di Dapil NTT

1, DPD Partai Demokrat menerapkan strategi segmentasi pemilih yang mencakup demografi, perilaku rasional-emosional, dan kohor untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap kelompok. Pemilih muda yang fokus pada pendidikan dan inovasi dijangkau dengan program konkret, sementara pemilih tua yang lebih mengutamakan kesejahteraan sosial mendapat perhatian melalui kebijakan sosial. Pendekatan rasional menekankan bukti keberhasilan, sedangkan pendekatan emosional dilakukan dengan interaksi langsung dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini memperkuat kedekatan dengan konstituen, memperluas dukungan, dan meningkatkan peluang kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2024.

### **Janji kampanye**

Dalam menghadapi Pemilu 2024, DPD Partai Demokrat melalui Satgas Pemenangan Pemilu mengusung 14 program unggulan yang terbagi dalam lima klaster utama. Fokus utama dari program-program ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perlindungan lingkungan, perbaikan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Program pendidikan yang berkualitas dan terjangkau menjadi prioritas, dengan tujuan memastikan setiap lapisan masyarakat, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dapat mengakses pendidikan yang bermutu. Selain itu, perbaikan layanan kesehatan juga

menjadi komitmen partai, termasuk dalam peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan di seluruh Kota Kupang.

Pemberdayaan UMKM dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari strategi ekonomi yang diusung oleh Partai Demokrat. UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal, akan mendapatkan dukungan melalui pelatihan, akses permodalan, dan peningkatan pemasaran untuk memperkuat daya saing mereka. Pembangunan infrastruktur, baik di perkotaan maupun di daerah perdesaan, akan dilakukan untuk memastikan pemerataan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Semua program ini dirancang untuk membawa dampak positif bagi perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Kota Kupang.

Selain itu, Partai Demokrat menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap langkah kebijakan. Program ini bertujuan untuk memastikan sistem hukum yang adil dan tidak memihak, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi penegakan hukum. Dengan pendekatan berbasis program yang terstruktur dan fokus pada kebutuhan masyarakat, Partai Demokrat berkomitmen untuk

membawa perubahan nyata yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat Kota Kupang dan Provinsi NTT secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi Pemilu 2024 di Dapil NTT 1, DPD Partai Demokrat melalui Satgas Pemenangan Pemilu mengusung 14 program unggulan yang terbagi dalam lima klaster utama, dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, perlindungan lingkungan, perbaikan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Program-program ini mencakup pendidikan berkualitas, perbaikan layanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan. Partai juga menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, guna membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan perubahan nyata bagi kesejahteraan Kota Kupang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Strategi Politik DPD Partai Demokrat NTT dalam Kontestasi Pemilu 2024 Provinsi NTT Studi Kasus Di Dapil NTT 1, penulis menyimpulkan bahwa strategi politik yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat dalam menghadapi pemilu berupa penerapan strategi politik *ofensif* dan *defensive*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Allahi, H. A., & Rahman, F. (2020). Kandidasi Calon Anggota Legislatif Koruptor: Refleksi atas Pemilu 2019 di Malang. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 46–57. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7085>
- Arikunto Suharsimi. (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Azis Suyadi & Abdul Azis. (2020). Penerapan Nilai Konstitusi Pasca Pemilu Legislatif Tingkat Kotamadya Sebagai Upaya Merumuskan Kehidupan Demokratis (Studi Kasus Pemilu Legislatif Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019). *Pamulang Law Review*, 3(2), 79–90.
- Bachmid, F. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Desideria Mentari. (2018). *Harga Sebuah Pilihan : Strategi PKS dan Partai Demokrat Menata Raut Wajah* (Cetakan 1). Polgov Fisipol UGM.
- Hadari Namawi. (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Ichsanul Amal. (2012). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Tiara Wacana.
- M. Fachri Adnan. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Demokrasi*, 1(1).
- Miriam Budiardjo. (2005). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mohamad iqbal. (2016). Kedudukan partai politik dalam menerima bantuan keuangan parpol. *E Jurnal Katalogis*, 4(6).
- Muhammad Pradana. (2021). *Fungsi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Lombok Timur*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Nazir, A. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas. *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, Vol. 4, No(2).
- Peter Schroder. (2010). *Strategi Politik*. Friedrich-Naumann-Stiftung.
- Ramlan Surbakti. (2007). *Memahami Ilmu Politik* (6th ed.). Raja Grafindo Persada. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ramlan Surbakti & Hari Fitrianto. (2015). *Transformasi Bawaslu*

- Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.*
- Ramlan Surbakti & Kris Nugroho. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.*
- Ramlan Surbakti, D. S. H. A. (2011). *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.*
- Sitti Rahmi, et, A. (2016). STRATEGI KOMUNIUKASI POLITIK DALAM SISTEM RECRUITMEN KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) WILAYAH SULAWESI TENGGARA. *Publica PPS AP UHO, I(1).*
- Suaib Napir. (2016). Strategi pemenangan Fahmi Massiara-Lukman dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Majene. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2(2), 147–159.*
- Tampinongkol, D., Kasenda, V., & Kimbal, A. (2019). Kandidasi Partai Politik dalam Pencalonan Anggota DPRD di Kota Bitung pada Pileg 2019 (Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung). *Jurnal Eksekutif, 3(3).*
- Thomas Mayer. (2012). Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis. In *Peran Partai Politik dalam Sembilan Tesis Sebuah Sistem Demokrasi* (3rd ed.). Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia Jalan Kemang Selatan II No. 2A Jakarta 12730/Indonesia.
- Usamah Hisyam. (2004). *Lika-liku Karier Sang Bintang, (MO) Men's Obsession, Edisi Khusus Mini Biografi SBY.* PT Dharmapena.